



Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat  
Vol. 08, No. 1 (April 2021): 1-6  
<http://societasdei.rcrs.org/index.php/SD/issue/archive>  
p-ISSN: 2407-0556; e-ISSN: 2599-3267  
DOI: 10.33550/sd.v8i1.235

## **TAJUK RENCANA**

---

### **TITIK BERANGKAT STRATEGI KEAMANAN NASIONAL**

*Semy Arayunedyia*

*Reformed Center for Religion and Society, Jakarta*

*semyarayunedyia@rcrs.org*

Keamanan (*security*) — dalam konteks politik negara dan hubungan internasional — adalah sebuah konsep yang menawarkan jaminan di mana tiap warga negara, masyarakat, dan negara dapat hidup dalam keadaan aman. Konsep ini cukup kontroversial karena setidaknya memuat dua hal: fleksibilitas definisi ancaman (*notion of threat*) dan subjektivitas dari *referent object* (komunitas masyarakat atau negara). Keduanya saling berkait. Ancaman dapat didefinisikan oleh *referent object* yang biasanya diperankan negara atau rezim pemerintah. Begitu ditentukan definisinya, negara mulai menggambarkan jenis dan skala ancaman terhadap teritori, kedaulatan, ideologi. Di sisi negara, konsep ini penting demi mengamankan kepentingan nasional.

Namun di sisi seberang, konsep ini rawan terjerumus pada fasisme dan ultranasionalisme. Keamanan nasional mencakup dimensi pertahanan dan perang. Pertahanan dimulai ketika konsepsi mengenai kepemilikan pribadi disadari oleh individu, kelompok, hingga negara-bangsa. Setidaknya, falsafah dari Clausewitz memengaruhi Ratzel dalam konsep *lebensraum* di mana kelompok manusia dalam suatu bangsa harus mempunyai ruang hidup di suatu wilayah dan harus mempertahankannya. Setelah membangun kubu pertahanan, perang menjadi aksi berikutnya mencaplok wilayah lain untuk mempertahankan keberadaan sebuah kelompok bangsa. Hal itu pula yang mendasari “kepentingan nasional” sebagai buah pemikiran Hitler yang dibukukan dalam *Mein Kampf* untuk terus berupaya mempertahankan kemudian secara agresif berperang demi ruang hidup bagi ras Arya

Tulisan ini tidak hendak melarutkan diri dalam tarik ulur perdebatan kedua kutub tersebut. Juga, tidak sejauh perenungan relasi keamanan negara (*state security*) dan warganya (*human security*) sebagaimana pernah disinggung oleh Montesquieu, John Stuart Mill, atau Thomas Hobbes ratusan tahun silam. Sebagai pengantar jurnal, tulisan ini hanya menyuguhkan latar belakang dan posisi redaksi terhadap berbagai isu terkini yang selanjutnya diharapkan memantik pembaca bergulat dengan hasil-hasil penelitian yang disajikan. Tulisan ini merupakan pengamatan terbatas terhadap geliat peningkatan keamanan nasional yang beberapa gejalanya bisa dilihat pada gejolak politik di Myanmar maupun kebijakan proteksionisme pangan oleh Vietnam dan Kazakhstan di masa pandemi. Pengamatan ini tentu bukan bertujuan untuk mengulas gejala yang ada melainkan bermuara pada penelusuran arti keamanan itu sendiri yang tidak pernah berhenti.

Dalam lingkup keamanan nasional (*national security*), penghalang kondisi aman adalah ancaman pada kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan energi. Belum lagi gelombang revolusi industri termutakhir yang memfokuskan negara pada peningkatan *cyber security*. Tugas serta tanggung

jawab menjadi mahaberoat manakala medan juang merengkuh keamanan nasional tidak lagi berhadapan *vis a vis* antarnegara melainkan asimetris menghadapi aktor ideologis yang mewujud dalam bentuk korporasi maupun teroris.

Dalam hal inilah negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Inggris, India, Swedia memiliki dokumen strategi keamanan nasional (*national security strategy*). Dokumen ini biasanya dirancang dan dikoordinasi oleh sebuah badan yang mengurus keamanan nasional dan di bawah arahan kepala negara atau pemerintahan sehingga menjadi pegangan jajaran di bawah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengamankan kepentingan nasional. Meskipun sebagian besar menghadapi isu yang beririsan seperti lingkungan hidup, terorisme, pangan dan lain-lain, namun masing-masing negara berbeda strategi dalam mengatasi isu-isu keamanan nasional.

Secara garis besar, dokumen tersebut menganalisis hal-hal strategis menyangkut: lingkungan strategis (*strategic environmental*), ancaman (*threat*), dan tindakan (*action*). Pengkajian (*assessment*) menyeluruh dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga, sektor swasta, dan komunitas sipil secara berkala. Kita dapat mencermati bagaimana negara-negara tersebut sudah memikirkan strategi menghadapi krisis air, pangan, energi, terorisme, dan bahkan beberapa diantaranya telah menyisipkan strategi mengatasi wabah penyakit belasan tahun sebelum Covid-19 merebak.

Para analis, pengamat, dan pengambil kebijakan seringkali berkuat pada penyediaan jaminan keamanan (*secureness*) dan pengimplementasian strategi (*strategy action*). Sudah barang tentu fokus itu tepat, namun jika sorot perhatian terlalu tajam diarahkan pada kedua hal tersebut maka kita melewatkan beberapa pokok yang substansial.

Dalam hal jaminan, barangkali adakah negara atau rezim yang sanggup menjamin keamanan warga negara dan masyarakat sepenuhnya? Berbagai peristiwa terkini seperti: lingkaran kejahatan rasisme terhadap warga kulit hitam, imigran, dan Asia yang terus mencuat di Amerika; terorisme di Eropa; serta penanganan wabah yang tidak keruan khususnya India menunjukkan bahwa tidak ada satu pun negara maupun rezim yang dapat menjamin keamanan.

Dalam hal strategi, kita juga mendapati tidak ada strategi yang ampuh dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman yang ada. Perdebatan seputar *strategi* menjadikan rentan terjebak pada urusan cara. Jarang disadari bahwa di balik perancangan dokumen strategi tidak semata-mata berpusat pada strategi melainkan jalan hidup (*way of life*). Jalan hidup ini tidak hanya menyeter seluruh arah kebijakan nasional melainkan

cerminan pandangan hidup bangsa yang menjadi kompas dalam meng-arungi tantangan tiap masa. Konstitusi maupun dokumen kemerdekaan suatu negara wajib menjadi rujukan baku.

Penerjemahan antara jalan hidup dan strategi terhadap dinamika zaman merupakan pekerjaan rumah sesungguhnya. Belum genap dua bulan setelah dilantik, Joe Biden, melalui Gedung Putih, merilis panduan dokumen sementara *National Security Strategy*. Jika sebelumnya Presiden Trump menerjemahkan jalan hidup dengan mengutamakan kepentingan nasional yang menabuh genderang perang ideologi dengan “Islam radikal”, perang dagang dengan Tiongkok, dan ke luar pada tahun 2020 dari Perjanjian Iklim Paris 2015, maka Joe Biden memandu jajarannya bagaimana pengejawantahan jalan hidup dalam mendukung dan melindungi kesetaraan hak perempuan, kelompok dari beragam latar belakang agama dan suku, penyandang difabel, hingga LGBTQI. Biden akan memprioritaskan pemberlakuan Undang-Undang Kesetaraan (*Equality Act*) selama 100 hari pertamanya sebagai presiden. Biden juga akan mengarahkan kabinetnya untuk memastikan segera penegakan undang-undang tersebut di semua departemen dan lembaga federal.

Dalam peperangan masa kini yang tidak bertumpu lagi pada senjata semata melainkan ketahanan pangan, teknologi, dan inovasi maka fondasi seperti ideologi adalah hal mendasar yang tidak dapat dipinggirkan. Meskipun belum memiliki dokumen *National Security Strategy*, Indonesia mempunyai fondasi yang jauh lebih penting dan kukuh yakni ideologi Pancasila. Ideologi ini terdiri dari lima sila di mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami dan menjadi sari pati bagi pelaksanaan sila-sila lain yang saling terjalin dan tidak terpisah.

Agama sebagai sumber ideologi memang memiliki catatan sejarah yang kelam. Ingatan yang cukup menggenggam adalah Abad Pencerahan. Istilah Abad Pencerahan itu sendiri merupakan penanda masa yang meng-gugat kehidupan di abad sebelumnya yang gelap karena dicengkeram oleh agama. Agama dianggap menghambat ilmu pengetahuan. Terkini, agama-agama diuji sebagai penghambat perdamaian dengan rupa ekstremis yang mengenakan jubah agama di Amerika, Irak, India, Myanmar. Penurunan minat terhadap agama begitu drastis di negara-negara yang dulu lekat dengan religiusitas. Namun, kita harus jujur pada sejarah yang menyingkapkan peran agama dalam kemajuan peradaban.

Agama memang tidak secara langsung memberi jaminan keamanan lahiriah. Agama justru membukakan realita penderitaan yang dihadapi manusia. Dan melaluinya, agama mengasah keyakinan para pemeluknya untuk mengusahakan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, kemajuan

bagi sesama dan lingkungan. Dengan demikian, sebenarnya agama mengonfrontasi ketidakadilan, ketidaksetaraan, kejahatan. Keamanan, dalam perspektif agama, tidak menegasikan penderitaan bahkan ketakutan. Dalam perjalanannya, perdebatan tentang salah dan benar, baik dan jahat, serta bagaimana menyikapinya apakah melalui pendidikan atau peperangan adalah wacana yang tetap akan ada.

Sebagai jurnal ilmiah yang terpenggil mewujudnyatakan ekosistem pengetahuan dan inovasi, maka upaya mengkaji dan menelaah nilai-nilai agama sebagai wacana menghadirkan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah sebuah keharusan. Pertama-tama, usaha tersebut harus memusatkan perhatian pada pembangunan manusia mulai dari akar rumput. Kecermatan mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dari tingkat lokal akan memberi pijakan kuat menapaki keamanan nasional

Jurnal diawali dari sumbangsih agama pada konteks daerah. Johanis Putratama Kamuri dan Grace Mariany Toumeluk membukakan konsep kekristenan dalam memandang salah satu laku kebudayaan daerah di Sumba, yakni belis. Analisis etis dan teologis yang dilakukan oleh kedua penulis diharapkan mentransformasi budaya belis. Pada artikel selanjutnya, konsep kekristenan juga digunakan oleh Christanto Sema Rappan Paledung untuk menawarkan penafsiran yang berbasis ayat Alkitab terhadap filantropi. Transformasi pemahaman mengenai filantropi kiranya mengilhami perjumpaan dan relasi umat kristen dengan para penganut agama lain. Konsep kekristenan kemudian dilanjutkan oleh Yusuf Siswantara yang mengeksplorasi makna pedagogis dan metode pendidikan agama Kristen untuk menjawab tren masalah sosial. Langkah pembinaan berbasis iman dengan analogi imajinatif merupakan kebaruan yang digali penulis.

Setelah konsep agama mendapat ruang untuk menganalisis perannya, kedua artikel berikutnya berupaya menggali sisi lain dari peran agama. Rohit Mahatir Manese mengulas kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menyebabkan diskriminasi pada agama leluhur dan intoleransi terhadap kelompok minoritas. Penulis bergumen bahwa pengarusutamaan nilai-nilai agama dan penodaan agama telah membuat keberagaman agama di Indonesia mengalami pluralitas terbatas. Pada artikel terakhir, Andreas Maurenis Putra melakukan penelitian secara reflektif. Dilatarbelakangi oleh kegelisahan kualitas keadaban di balik pandemi *Covid-19*, penulis mengajak pembaca membangun keadaban baru berbasis solidaritas global sebagai implikasi etis-normatif serta implikasi teologis.

Sebagaimana terulas dalam hasil-hasil penelitian dari lingkup lokal, nasional, hingga global maka peran agama dan kepercayaan akan senantiasa

#### TAJUK RENCANA

diberdayakan. Usaha ini mengonfrontasi segala bentuk kebudayaan yang merendahkan derajat kemanusiaan. Dan bukan tidak mungkin upaya ini mendapat tentangan berbagai pihak. Barangkali sebuah pandangan mengenai agama sebagai sumber konflik memang tepat karena titik berangkat ini bukanlah mengandai sebuah kehidupan tanpa ancaman melainkan medan laga melawan ketakutan, karena menghadirkan keadilan dan kedamaian yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan.